

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatkan kesejahteraan secara luas merupakan salah satu tujuan utama Indonesia sebagai negara berbangsa dan bernegara, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Untuk melakukan ini, pemerintah harus mengambil sejumlah tindakan untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Desentralisasi adalah suatu proses di mana pemerintah pusat memindahkan sebagian wewenangnya kepada daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam upaya mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi adalah tindakan mentransfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang kemudian mengontrol urusan internal mereka sendiri. Desentralisasi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi. Memberikan kewenangan lebih kepada Pemerintah Daerah dalam upaya membuatnya berjalan lebih efektif.

Peran penting pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan nasional dalam era otonomi daerah, antara lain adalah mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya. Namun, tidak semua aspek pemerintahan pusat dialihkan kepada pemerintah daerah. Beberapa bidang seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, kebijakan moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Tujuan dasar pembangunan adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Menjadikan kesejahteraan sebagai prioritas dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilakukan. Desentralisasi memberikan

keleluasaan bagi daerah untuk tumbuh dan memimpin pembangunannya sendiri, serta mendekatkannya pada kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun rencana pembangunan daerah yang lebih kuat sehingga masyarakat yang sejahtera dapat terwujud.

Selanjutnya Pemerintah Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Adanya UU tersebut menciptakan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pertumbuhan daerah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran organisasi pelayanan di daerah, seperti Dinas Sosial Kota Bandung yang mengurus masalah kesejahteraan masyarakat, merupakan gambaran desentralisasi. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, maka negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang layak dan bermartabat bagi masyarakat Indonesia, pembangunan kesejahteraan sosial memiliki peran yang sangat penting. Indonesia adalah salah satu negara yang menghadapi tantangan dalam hal kesejahteraan sosial, dan tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir dan direncanakan dengan tujuan meningkatkan taraf dan kualitas hidup manusia, sesuai dengan pandangan (Suharto, 2011). Sebaliknya, menurut (Suharto, 2009), pembangunan kesejahteraan sosial adalah suatu usaha yang disengaja yang mencakup serangkaian tindakan dan layanan

sosial dengan tujuan memenuhi kebutuhan individu, mengatasi serta mencegah masalah-masalah sosial, dan memperkuat struktur sosial. Menurut pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan menjalankan fungsi sosialnya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social; kemampuan hidup layak; kapasitas untuk pengembangan diri; dan kemampuan untuk melakukan tugas sosial adalah faktor yang menentukan kesejahteraan sosial. Tujuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Menurut paparan Dinas Sosial Kota Bandung, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merujuk kepada individu, keluarga, komunitas, atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kewajiban sosialnya karena berbagai hambatan, masalah, atau gangguan. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka dengan baik dan efektif. Tantangan dan gangguan ini bisa muncul karena berbagai faktor seperti keterbelakangan pembangunan, kemiskinan, pengabaian, disabilitas, masalah sosial, persaingan, dan perubahan lingkungan yang tiba-tiba.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) didorong oleh berbagai faktor, khususnya di Kota Bandung. Permasalahan kemiskinan yang merajalela menjadi salah satu faktornya. Salah satu permasalahan yang disebut-sebut menghambat pertumbuhan suatu daerah adalah tantangan kemiskinan itu sendiri. Meskipun Badan Pusat Statistik Kota Bandung secara konsisten menyatakan bahwa angka kemiskinan cenderung menurun setiap tahunnya, namun angka kemiskinan di tingkat masyarakat masih sangat tinggi.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan Kota
Bandung, 2018-2022

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	448 902 %	474 448 %	500 452 %	515 396 %	545 675 %
Indeks Kedalaman Kemiskinan	89,38 %	84,67 %	0,61 %	0,78 %	0,70 %
Indeks Keparahan Kemiskinan	3,57 %	3,38 %	0,13 %	0,24 %	0,17 %
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	0,48 %	0,53 %	100,02 %	112,50 %	109,82 %
Persentase Penduduk Miskin	0,11 %	0,15 %	3,99 %	4,37 %	4,25 %

Sumber: <https://bandungkota.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.1 Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga hal ini juga berpengaruh pada jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bandung. Berikut ini adalah tabel jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bandung tahun 2018-2022

Tabel 1.2
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bandung
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2018	21.256
2019	10.091
2020	10.091
2021	13.044
2022	13.044

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id/>

Dengan merujuk pada data tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung telah mengadopsi strategi penanganan yang lebih mendalam, melibatkan berbagai sektor, dan dijalankan secara terkoordinasi guna memastikan pemenuhan dan perlindungan kebutuhan serta hak-hak para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Mengenai permasalahan kesejahteraan yang berkembang saat ini bertambah dengan adanya keberadaan gelandangan dan para pengemis. Selain itu keberadaan mereka ini diakibatkan dari tingginya angka kemiskinan di pedesaan, pengangguran, dan tingginya tingkat urbanisasi ke Kota Bandung. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, para gelandangan dan pengemis (termasuk juga anak jalanan di dalamnya) sebagian besar berasal dari luar kota.

Pemkot Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun jika hanya mengandalkan kebijakan pemerintah saja dinilai tidak cukup. Masyarakat juga harus ikut andil dengan mengubah kebiasaan, seperti memberi uang kepada pengemis. Perlu ditahui bahwa peningkatan masalah kesejahteraan sosial ini dikarenakan dari kebiasaan kita sendiri dengan memberi uang kepada para pengemis. Hal ini berakibat banyaknya pengemis datang ke Kota Bandung karena dinilai pendapatan mereka cukup banyak dibanding bekerja.

Selanjutnya pula Dinas Sosial memiliki konsen terhadap kelompok pekerja yang gemar berjualan di perhentian lampu lalu lintas atau pada jalan-jalan tertentu. Kegiatan ini dinilai ada yang mengkoordinirnya, seperti menjual tissue dan yang lainnya. Tujuan dari strategi penanganan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bandung**”.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian permasalahan di atas, penulis menjabarkan permasalahan dalam bentuk yaitu *Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bandung?*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bandung?

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dengan terlaksananya penelitian ini, tentu diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara subjektif, yaitu dapat meningkatkan keterampilan dan proses terlatihnya berpikir secara ilmiah serta keahlian dalam berbentuk tulisan ilmiah yang berdasarkan pada penelitian teoritis yang diraih dari administrasi publik.
2. Secara praktis, yaitu mampu memberikan ide-ide ataupun masukan dan pemikiran kepada Dinas Sosial Kota Bandung.

3. Secara akademis, yaitu sebagai bahan referensi maupun literatur pelengkap untuk kepustakaan FISIP. Selain itu, dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Dalam rangkaian penelitian ini, tentunya peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bandung”. Adapun teori yang digunakan yaitu teori strategi pemerintahan (Geoff Mulgan, 2009) yang menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran).



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran